

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi dalam pengelolaan aset daerah pengamanan dan pemeliharaan.

Penganggaran adalah suatu perencanaan yang disajikan dalam bentuk satuan uang dan disusun berdasarkan kesepakatan melalui rapat kerja yang berfungsi selama satu periode berjalan. Penyusunan anggaran merupakan bentuk komitmen organisasi yang didalamnya terdapat strategi, program, anggaran biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menyusun anggaran terdapat proses yang dilalui mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pembagian tugas, penyusunan rencana, dan implementasi dari rencana tersebut yang pada akhirnya sampai kepada tahap pengawasan yang nantinya akan dievaluasi berdasarkan hasil dari anggaran yang telah sepakati.

Dewasa ini ekonomi negara Indonesia mengalami ketidakstabilan akibat adanya pandemi Covid-19. Tidak stabilnya ekonomi secara nasional membuat kita harus kembali memahami bagaimana krusialnya peran otonomi daerah yang bisa membuat keputusan untuk daerahnya sendiri. Dalam penataan kembali konsep otonomi daerah tersebut maka dalam prosesnya, pemerintah harus menjamin terjadinya prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dalam penyusunan anggaran dalam praktek penyelenggaraan pemerintah menuju *Good Governance*.

Good Governance dilaksanakan perlu suatu perencanaan pembangunan daerah yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan keadaan perekonomian pemerintah daerah itu sendiri, karena itu perencanaan

dan penganggaran dalam pemerintah daerah sangatlah penting untuk dilaksanakan karena bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Adanya kewenangan untuk setiap daerah dalam mengatur sumber daya yang mereka miliki memberikan keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengoptimalkan manajemen aset yang mereka miliki selagi hal tersebut masih sejalan dengan sistem yang ada pada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dapat menjadi pembuktian komitmen pemerintah daerah untuk memperlihatkan kemandirian mereka dalam membangun daerahnya. Oleh sebab itu, kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Aset termasuk kepada sumberdaya yang sangat penting dan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga, aset merupakan gambaran kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai warisan dari masa lalu yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Manfaat utama dari penganggaran adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling menguntungkan yang akan dilakukan. Dengan penyusunan anggaran, upaya perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah itu tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Sebagai perencanaan terpadu, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai

kegiatan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna, baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja pemerintah dapat lebih baik.

BAPPEDA sebagai lembaga yang menyiapkan rencana-rencana pembangunan seperti yang di amanatkan oleh UU tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. BAPPEDA juga harus melakukan upaya pengembangan kelembagaan agar mampu melakukan perencanaan yang partisipatif dan sekaligus menumbuhkan budaya perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara lebih intensif.

Penulis memilih kantor BAPPEDA Kota Sawahlunto sebagai tempat magang yaitu karena Kota Sawahlunto pada umumnya sudah dikenal banyak oleh masyarakat sumbar dan juga semua orang dapat menilai bagaimana perkembangan pembangunan

di Kota Sawahlunto tersebut. Serta alasan yang paling signifikan yang dirasakan penulis adalah memudahkan penulis proses menyelesaikan tugas akhir.

Oleh karena itu dalam kasus ini penulis mengambil judul. **“PROSES PENGANGGARAN BARANG DAN ASSET MILIK DAERAH PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI BAPPEDA”**

1.2 Rumusan Masalah

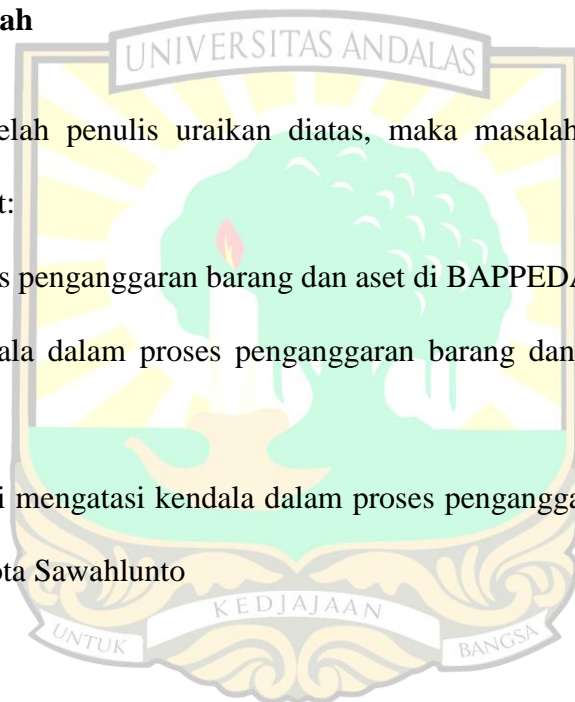
Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penganggaran barang dan aset di BAPPEDA Kota Sawahlunto
2. Bagaimana kendala dalam proses penganggaran barang dan aset di BAPPEDA Kota Sawahlunto
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penganggaran barang dan aset di BAPPEDA Kota Sawahlunto

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dari penganggaran barang dan aset di BAPPEDA Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencapaian target penganggaran barang dan aset di BAPPEDA.



1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan
2. Menambah pengalaman penulis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja untuk aktifitas pemeriksaan pajak pada BAPPEDA di Kota Sawahlunto.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, pengumpulan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

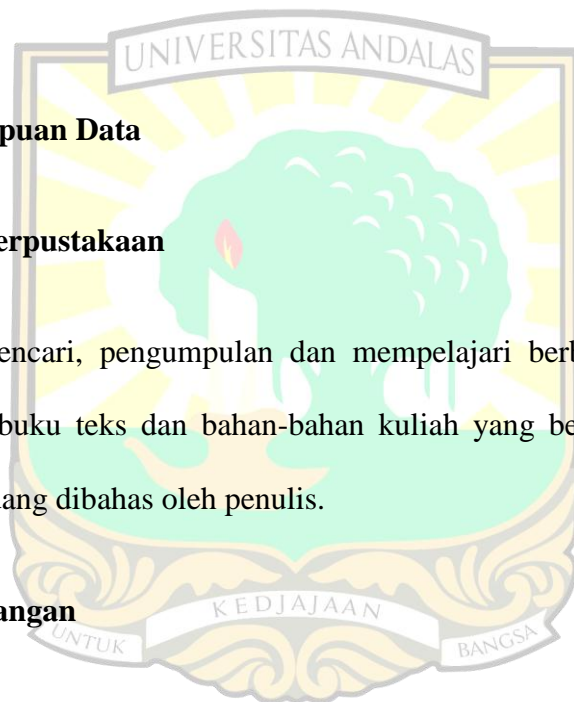
1.5.2 Studi Lapangan

1. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.



1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas 5 bab yang mana disetiap bab terdiri sub-sub yang menjadi satu kesatuan. Kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil studi laporan selama di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyangkut tentang Administrasi Perkantoran.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang baik bagi perusahaan.